



Pengelolaan Ruang Publik di Destinasi Wisata: Antara Peluang Ekonomi dan Tantangan Sosial

Rismawati¹, Huldiya Syamsiar^{1*}, M. Zainul Asror¹

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia
Email: rismawati190112021@hamzanwadi.ac.id, huldiya@hamzanwadi.ac.id,
zainulasror@hamzanwadi.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 01-06-2025, Revised: 20-09-2025, Accepted: 30-11-2025, Published: 30-12-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan ruang publik di kawasan wisata Pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan fokus pada keseimbangan antara peluang ekonomi dan tantangan sosial yang muncul. Menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang warung kopi, pengunjung, pengelola pantai, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warung kopi memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat lokal dengan kontribusi ekonomi yang meningkat pada hari biasa maupun akhir pekan. Namun, keberadaan fasilitas tempat duduk tertutup yang disediakan untuk menarik pengunjung juga menimbulkan tantangan sosial, berupa munculnya aktivitas yang melanggar norma seperti berpelukan, berciuman, dan konsumsi minuman keras di kalangan pengunjung. Tantangan ini dipicu oleh lemahnya kontrol sosial dan belum adanya regulasi tertulis tentang tata tertib di kawasan wisata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran kontrol sosial melalui regulasi, pengawasan, edukasi, dan kolaborasi antara pengelola, pedagang, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem wisata yang produktif sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan religius.

Kata Kunci:

ekonomi lokal; pariwisata pesisir; pengelolaan ruang publik; ruang publik; tantangan sosial

Abstract

This study examines the management of public space in the Labuhan Haji Beach tourism area, East Lombok Regency, focusing on the balance between economic opportunities and emerging social challenges. Employing a qualitative case study design, this research involved observations, in-depth interviews, and documentation involving coffee shop vendors, visitors, beach managers, and village authorities. The findings indicate that coffee shops play a strategic role in supporting the local community's economy, with increasing economic contributions on both weekdays and weekends. However, the presence of enclosed seating facilities provided to attract visitors has also generated social challenges, including norm-violating activities such as hugging, kissing, and alcohol consumption among visitors. These challenges are driven by weak social control and the absence of written regulations governing conduct within the tourism area. This study recommends strengthening social control mechanisms through regulation, supervision, education, and collaboration among managers, vendors, village authorities, and local communities to create a productive tourism ecosystem while preserving social and religious values.

Keywords:

local economy; public space; public space management; social challenges; tourism destination



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan sektor pariwisata telah mendorong transformasi ruang publik di berbagai destinasi wisata menjadi ruang yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di kawasan wisata pantai, perubahan tersebut terlihat melalui bertambahnya fasilitas pendukung, seperti warung makan, kafe, kios, dan area istirahat yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kehadiran fasilitas tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya tarik destinasi wisata. Di sisi lain, perubahan fungsi ruang publik juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan kawasan wisata karena meningkatnya intensitas interaksi sosial di dalamnya.

Pantai Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu destinasi wisata pesisir yang berkembang sebagai ruang publik sekaligus ruang ekonomi masyarakat. Lokasinya yang mudah diakses, tidak dipungut biaya masuk, serta didukung panorama pantai menjadikan kawasan ini sebagai tujuan wisata favorit masyarakat, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Tingginya jumlah kunjungan mendorong pemerintah daerah melakukan penataan kawasan melalui pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti berugaq dan area usaha bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, masyarakat mengembangkan berbagai usaha pendukung, termasuk warung kopi, warung makan, dan kafe yang menyediakan makanan, minuman, serta tempat beristirahat bagi pengunjung.

Keberadaan warung kopi memperlihatkan peran penting sektor informal dalam mendukung aktivitas pariwisata. Selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal, warung kopi juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial bagi wisatawan. Untuk meningkatkan daya saing usaha, sebagian pelaku usaha menyediakan fasilitas tambahan berupa ruang duduk yang lebih privat atau semi-tertutup sehingga pengunjung dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Strategi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus menarik minat wisatawan.

Namun, pemanfaatan ruang yang semakin privat menghadirkan dinamika sosial yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ruang-ruang tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat, tetapi menjadi lokasi berbagai aktivitas yang oleh sebagian masyarakat dipandang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perubahan desain dan pemanfaatan ruang publik dapat memengaruhi pola interaksi pengunjung serta menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan destinasi wisata. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga

menyangkut tata kelola ruang publik yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi sosial kawasan wisata.

Perspektif pengelolaan destinasi, ruang publik merupakan bagian penting dari pengalaman wisata yang perlu dikelola agar tetap memberikan rasa aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pengguna. Pengelolaan ruang publik tidak cukup berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik dan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memerlukan pengaturan pemanfaatan ruang, pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga fungsi sosial kawasan wisata. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi salah satu indikator penting keberlanjutan destinasi wisata.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas perilaku menyimpang di kawasan wisata dengan menitikberatkan pada faktor individu maupun lemahnya pengendalian sosial. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman mengenai bentuk dan penyebab perilaku menyimpang, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana pengelolaan ruang publik dan penyediaan fasilitas wisata dapat membentuk pola pemanfaatan ruang oleh pengunjung. Padahal, karakteristik ruang dan desain fasilitas merupakan bagian dari tata kelola destinasi yang berpotensi memengaruhi perilaku sosial di kawasan wisata.

Penelitian mengenai pengelolaan ruang publik di kawasan wisata telah berkembang dari berbagai perspektif, mulai dari perilaku pengunjung, pemanfaatan ruang publik, hingga dampak sosial-ekonomi pengembangan destinasi wisata. Putri Hayati (2022) mengkaji penyimpangan sosial masyarakat di kawasan wisata Pantai Lhoknga, Aceh Besar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berkembangnya aktivitas pariwisata turut diikuti oleh munculnya berbagai bentuk perilaku yang dipandang bertentangan dengan norma sosial masyarakat setempat. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa berbagai upaya pengendalian telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, pemasangan rambu-rambu, serta pembinaan kepada masyarakat dan wisatawan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga pengawasan di kawasan wisata belum berjalan secara optimal.

Perspektif berbeda, Rahmani et al. (2022) meneliti aktivitas nongkrong di kawasan SunsetSurf Cafe Pantai Lhoknga sebagai bagian dari perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan muda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ruang publik di kawasan wisata tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, pembentukan identitas, dan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Meskipun demikian, aktivitas tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang memperhatikan norma sosial dan karakteristik budaya masyarakat setempat agar fungsi ruang publik tetap terjaga.

Kajian mengenai pemanfaatan ruang publik di kawasan pesisir juga dilakukan oleh Kapita dan Kusman (2022) di kawasan Pantai Army Dock, Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian tersebut menunjukkan ruang terbuka publik di kawasan pesisir memiliki fungsi yang saling beririsan, yaitu sebagai ruang komersial, ruang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan ruang rekreasi. Temuan ini menegaskan bahwa ruang publik di kawasan wisata merupakan ruang multifungsi yang memerlukan

pengelolaan secara terpadu agar berbagai aktivitas yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan secara harmonis.

Sementara itu, Haikal, Aryani & Riyaldi (2022) mengkaji dampak pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Penelitian tersebut menunjukkan pengembangan destinasi wisata memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus membawa perubahan pada aspek sosial dan budaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengembangan destinasi wisata selalu menghasilkan konsekuensi multidimensional sehingga memerlukan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara aktivitas wisata, perilaku pengunjung, dan dampak sosial pengembangan destinasi, sebagian besar masih berfokus pada salah satu aspek secara terpisah, baik perilaku menyimpang, gaya hidup pengunjung, fungsi ruang publik, maupun dampak sosial-ekonomi pariwisata. Penelitian terdahulu belum banyak menjelaskan bagaimana penyediaan fasilitas usaha oleh masyarakat lokal, khususnya warung kopi beserta ruang-ruang semi privat yang menyertainya, memengaruhi perubahan pola pemanfaatan ruang publik sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan destinasi wisata.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan pengelolaan ruang publik sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini memandang ruang publik kawasan wisata sebagai arena yang mempertemukan dua kepentingan yang saling berkaitan, yaitu penguatan aktivitas ekonomi masyarakat lokal melalui usaha warung kopi dan terjaganya fungsi sosial ruang publik sebagai ruang rekreasi yang aman, nyaman, dan inklusif. Dengan menggunakan studi kasus di Pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Penelitian ini berupaya menjelaskan konfigurasi ruang, penyediaan fasilitas usaha, serta pola pemanfaatan ruang oleh pengunjung membentuk dinamika antara peluang ekonomi dan tantangan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif pengelolaan ruang publik dengan dinamika sosial di destinasi wisata pesisir sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola kawasan wisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran warung kopi sebagai peluang ekonomi dalam mendukung penghidupan masyarakat lokal di kawasan wisata Pantai Labuhan Haji, mengkaji dinamika pemanfaatan ruang publik beserta tantangan sosial yang muncul sebagai konsekuensi perkembangan aktivitas wisata, serta menganalisis pengelolaan ruang publik yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan pemeliharaan nilai-nilai sosial di kawasan wisata. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara pemanfaatan ruang publik, aktivitas ekonomi lokal, dan dinamika sosial di destinasi wisata pesisir. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan ruang publik yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang berkembang dalam konteks kehidupan nyata (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena pengelolaan ruang publik di kawasan wisata Pantai Labuhan Haji sebagai suatu kasus yang memiliki karakteristik dan konteks sosial yang khas (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Labuhan Haji, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan salah satu destinasi wisata pesisir yang berkembang sebagai ruang publik sekaligus ruang ekonomi masyarakat melalui keberadaan warung kopi, warung makan, dan berbagai fasilitas pendukung wisata. Perkembangan aktivitas ekonomi tersebut diikuti oleh dinamika sosial yang menjadikan kawasan ini relevan sebagai lokasi penelitian.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan ruang publik di kawasan wisata (Creswell & Poth, 2018). Informan terdiri atas pengelola Pantai Labuhan Haji, perangkat Desa Labuhan Haji, pedagang warung kopi, dan pengunjung kawasan wisata. Sebanyak 24 pedagang warung kopi menjadi informan utama karena memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan pengunjung serta memahami perkembangan aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Pemilihan informan selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan tema-tema baru (Saunders et al., 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipan untuk mengamati kondisi fisik kawasan wisata, tata letak fasilitas publik, aktivitas ekonomi masyarakat, pola pemanfaatan ruang oleh pengunjung, serta interaksi sosial yang berlangsung di kawasan pantai (Yin, 2018). Pengamatan dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam hari agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika aktivitas di lokasi penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam sesuai konteks penelitian (Creswell & Poth, 2018). Wawancara dengan pengelola kawasan wisata difokuskan pada kebijakan pengelolaan, penyediaan fasilitas, dan mekanisme pengawasan kawasan. Wawancara dengan pedagang warung kopi untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha, penyediaan fasilitas bagi pengunjung, serta pengalaman mereka dalam mengelola aktivitas usaha. Wawancara dengan pengunjung bertujuan menggali motivasi berkunjung, pola pemanfaatan ruang publik, dan persepsi terhadap fasilitas yang tersedia, sedangkan

wawancara dengan perangkat desa dilakukan untuk memahami peran pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kondisi kawasan wisata, fasilitas publik, aktivitas ekonomi masyarakat, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Pantai Labuhan Haji. Dokumentasi berfungsi memperkuat hasil observasi dan wawancara serta memberikan gambaran empiris mengenai kondisi lapangan (Yin, 2018). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola, pedagang, pengunjung, dan perangkat desa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, *member checking* dilakukan kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan informasi yang mereka sampaikan (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan pendalaman, klarifikasi, dan verifikasi secara terus-menerus terhadap temuan penelitian..

Hasil dan Pembahasan

1. Peluang Ekonomi: Peran Warung Kopi dalam Perekonomian Lokal

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan kawasan wisata Pantai Labuhan Haji telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui tumbuhnya usaha warung kopi di sepanjang kawasan pesisir. Keberadaan usaha tersebut merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap meningkatnya aktivitas wisata yang mengubah fungsi ruang publik dari ruang rekreasi menjadi ruang yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks ini, ruang publik menjadi tempat interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta berkembang sebagai ruang produksi ekonomi yang mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

Fenomena transformasi ruang di destinasi wisata Indonesia memperlihatkan pergeseran fungsi kawasan seiring berkembangnya aktivitas pariwisata. Ramadhan (2024) menunjukkan perkembangan Canggü dari desa agraris tradisional menjadi destinasi wisata komersial mendorong perubahan pada dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pertumbuhan kunjungan dan infrastruktur wisata memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mengubah orientasi pemanfaatan ruang dan pola kehidupan lokal.

Data menunjukkan, terdapat 24 warung kopi yang beroperasi di kawasan Pantai Labuhan Haji. Warung-warung tersebut umumnya menjual kopi, es kelapa, minuman ringan, makanan ringan, rokok, serta berbagai menu sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Meskipun produk yang dipasarkan relatif homogen sehingga memunculkan persaingan antarpelaku usaha, aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan masyarakat mampu memanfaatkan potensi wisata sebagai sumber mata pencaharian alternatif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan destinasi wisata memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap tumbuhnya usaha mikro yang menopang ekonomi rumah tangga masyarakat lokal (OECD, 2020). Penelitian Pajriah dkk. (2025) tentang dampak berganda objek wisata Situ Cipanten menemukan bahwa aktivitas wisata memberikan dampak ekonomi signifikan. Hal ini tercermin dari munculnya usaha baru, peningkatan permintaan bahan baku lokal, serta meningkatnya konsumsi masyarakat.

Salah seorang pedagang, IN, menjelaskan usaha warung kopi telah menjadi sumber pendapatan utama keluarganya sejak mulai berjualan sekitar empat tahun yang lalu. Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh.

"Seperti yang mbak lihat jika di hari-hari biasa seperti hari Senin sampai Jumat pengunjung yang datang tidak terlalu ramai karena itu kita buka sampai jam 10.00 malam, dan biasanya per harinya kita bisa dapat penghasilan sekitar 400 ribu sampai dengan 500 ribu. Beda dengan malam Minggu sampai hari Minggu, biasanya kami dapat jualan sekitar 750 ribu, pernah juga lebih. Kita bukanya sampai jam 12 malam karena di hari itu biasanya ramai sekali pengunjung yang datang."

Keterangan informan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kunjungan wisatawan. Pendapatan pedagang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada akhir pekan dan hari libur, ketika jumlah wisatawan meningkat dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor pariwisata menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Labuhan Haji. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, fenomena ini menunjukkan bahwa destinasi wisata mampu menciptakan peluang kerja, memperluas sumber pendapatan rumah tangga, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui berkembangnya usaha mikro berbasis pariwisata (UNWTO, 2021).

Temuan ini sejalan dengan konsep *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya serta penyediaan produk dan layanan wisata (Goodwin & Santilli, 2009). Fitrianto et al. (2024) menunjukkan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal di Desa Sekapuk, Gresik, mampu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset desa, pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, dan kolaborasi kelembagaan. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi pariwisata memperluas peluang penghidupan sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi lokal.

Selain menjual makanan dan minuman, hasil observasi menunjukkan hampir seluruh warung menyediakan fasilitas berupa tempat duduk, berugak, maupun ruang istirahat yang dapat digunakan pengunjung untuk menikmati suasana pantai. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi strategi utama pedagang dalam menarik minat pengunjung sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh N berikut.

"Pengunjung yang mampir di sini harus memesan makanan atau minuman dulu sebelum duduk untuk istirahat. Kalau mereka belum memesan makanan atau minuman, mereka tidak boleh duduk di sini. Kebanyakan yang datang ke sini lebih banyak pasangan anak muda yang sedang berpacaran. Mereka bisa duduk di sini sampai berjam-jam, bahkan dari pagi sampai sore."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas bukan hanya merupakan bentuk pelayanan kepada wisatawan, tetapi strategi ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) pengunjung sehingga mendorong peningkatan konsumsi. Dalam ekonomi pariwisata, semakin lama wisatawan berada pada suatu destinasi, semakin besar peluang terjadinya transaksi ekonomi yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal (OECD, 2020). Penelitian Wijaya & Mustika (2025) menunjukkan lama tinggal wisatawan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pengeluaran wisatawan. Dengan demikian, ruang duduk, berugak, dan fasilitas istirahat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pelayanan wisata sekaligus instrumen ekonomi yang memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat.

Dari perspektif pengelolaan ruang publik, temuan ini menunjukkan bahwa ruang publik di Pantai Labuhan Haji mengalami transformasi fungsi menjadi ruang ekonomi masyarakat. Warung kopi tidak lagi dipahami semata sebagai tempat menjual makanan dan minuman, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi destinasi wisata yang menghubungkan kebutuhan wisatawan dengan strategi penghidupan masyarakat lokal. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki karakter multifungsi, yakni sebagai ruang interaksi sosial sekaligus ruang produksi ekonomi.

Carmona (2021) menjelaskan bahwa ruang publik yang dikelola secara produktif mampu menciptakan nilai ekonomi, memperkuat vitalitas kawasan, dan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan konsep tersebut juga terjadi di Pantai Labuhan Haji, di mana pemanfaatan ruang publik menjadi faktor penting dalam mendukung berkembangnya usaha mikro berbasis pariwisata. Ristiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa komodifikasi ruang melalui pengembangan pariwisata dapat mendorong perubahan penggunaan lahan, gentrifikasi perdesaan, serta pergeseran akses dan manfaat antarpelaku. Temuan tersebut menegaskan perlunya pengelolaan ruang publik di destinasi wisata yang mampu menyeimbangkan optimalisasi manfaat ekonomi dengan perlindungan fungsi sosial, akses masyarakat, dan keberlanjutan ruang.

Hasil penelitian ini memperkuat berbagai penelitian yang menyatakan bahwa usaha mikro di kawasan wisata memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan berkembangnya ekonomi lokal (UNWTO, 2021; OECD, 2020). Penelitian tentang dampak ekonomi pariwisata terhadap UMKM di kawasan wisata Candi Borobudur juga memperluas perspektif efek pengganda dengan pertimbangan keberlanjutan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan dimensi yang lebih spesifik, yaitu keberhasilan ekonomi masyarakat oleh kemampuan pelaku usaha memanfaatkan ruang publik sebagai aset ekonomi melalui penyediaan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik pengunjung.

2. Tantangan Sosial: Dinamika Pemanfaatan Ruang Publik

Meskipun perkembangan warung kopi di Pantai Labuhan Haji memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut juga memunculkan tantangan sosial dalam pemanfaatan ruang publik. Ruang publik yang semula berfungsi sebagai tempat rekreasi, interaksi sosial, dan menikmati lanskap pantai berkembang menjadi ruang ekonomi yang sekaligus menyediakan ruang semi-privat bagi pengunjung. Perubahan fungsi ini memperlihatkan pengembangan destinasi wisata menghasilkan nilai ekonomi dan membentuk dinamika sosial baru yang memerlukan tata kelola yang adaptif. Dalam perspektif tata kelola ruang publik, ruang wisata merupakan arena yang mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan sehingga pengelolaannya harus mampu menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan tersebut (Carmona, 2021; Mehta, 2020; UN-Habitat, 2020).

a. Pergeseran Fungsi Ruang Publik

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warung kopi menyediakan fasilitas berupa berugak, gazebo, dan tempat duduk semi-tertutup untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pada awalnya fasilitas tersebut disediakan sebagai bagian dari pelayanan wisata. Namun, dalam praktiknya sebagian pengunjung memanfaatkan ruang tersebut sebagai tempat yang relatif privat untuk melakukan aktivitas di luar fungsi rekreatif kawasan wisata. Seorang informan, R (22 tahun) mengungkapkan:

"Tiap kali saya datang ke Pantai Labuhan Haji, tujuan saya pasti ingin ke warung kopi karena di sini kami disediakan tempat duduk yang khusus dan lebih tertutup. Jadi kami nyaman untuk duduk dan mengobrol di sini. Di sini juga kita mau ngelakuin apapun tidak ada yang akan melihat karena tempatnya tertutup."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik fisik ruang memengaruhi perilaku pengguna dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Ruang yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan kemudian dipersepsikan sebagai ruang privat yang memberikan keleluasaan melakukan berbagai aktivitas tanpa pengawasan. Dalam kajian perilaku ruang (behavior setting), bentuk dan konfigurasi ruang memiliki pengaruh terhadap pola interaksi sosial dan perilaku penggunaannya (Mehta, 2020). Oleh karena itu, desain ruang publik membentuk peluang munculnya berbagai praktik sosial.

Transformasi fungsi ruang publik seperti yang ditemukan di Pantai Labuhan Haji merupakan fenomena yang banyak dibahas dalam studi tata kelola destinasi wisata. Carmona (2021) menjelaskan bahwa ruang publik yang mengalami komersialisasi cenderung bergeser dari ruang yang terbuka dan inklusif menjadi ruang yang semakin selektif berdasarkan kepentingan ekonomi. Penelitian Marpaung dan Sudrajat (2024) mengenai kawasan Jalan Tunjungan Surabaya juga menunjukkan bahwa transformasi ruang publik sebagai destinasi wisata mengubah pola interaksi masyarakat dan cara pengunjung memanfaatkan ruang. Demikian pula, Ayuningtyas (2023) menemukan perubahan fungsi ruang wisata turut

menggeser makna ruang dari ruang sosial masyarakat menjadi ruang konsumsi wisata.

b. Dinamika Pemanfaatan Ruang dan Munculnya Pelanggaran Norma

Perubahan fungsi ruang publik tersebut diikuti oleh munculnya berbagai aktivitas yang dipersepsikan masyarakat sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, aktivitas yang paling sering dijumpai meliputi berpelukan, berciuman, dan konsumsi minuman beralkohol, terutama pada malam hari. Salah seorang informan, R (26 tahun) menyatakan:

"Saya sudah berkali-kali pacaran di tempat ini karena kami menganggap tempat ini sangat aman. Orang lain tidak akan bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam karena tempatnya tertutup. Jadi bebas aja di sini. Tidak ada peraturan apapun. Kita mau pulang jam berapa pun tidak ada batasan waktunya, asalkan kita tetap memesan makanan yang dijual."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap keamanan ruang dan minimnya pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi perilaku pengunjung. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku pengunjung tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara karakteristik ruang, persepsi pengguna, dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam perspektif *tourism governance*, perilaku wisatawan dipengaruhi oleh desain ruang, keberadaan regulasi, dan mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh pengelola destinasi (Hall, 2019; Dredge & Jamal, 2015).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Hayati (2022) yang menemukan bahwa lemahnya pengawasan di kawasan Pantai Lhoknga, Aceh Besar, menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Penelitian Rosa dkk. (2022) di Pelabuhan Meulaboh juga menunjukkan bahwa ruang yang remang-remang dan minim pengawasan meningkatkan peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Dengan demikian, tantangan sosial di Pantai Labuhan Haji tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang yang memberikan peluang bagi terjadinya aktivitas tersebut.

c. Lemahnya Tata Kelola dan Kontrol Sosial

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan belum terdapat aturan tertulis mengenai pemanfaatan fasilitas maupun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pengunjung. Salah seorang pengelola menyatakan:

"Di warung kopi ini, kami tidak pernah membuat aturan ataupun peraturan apapun karena tujuan kami di sini hanya menyediakan fasilitas tempat duduk saja bagi para pengunjung yang datang. Selebihnya kami tidak mengetahui apapun yang terjadi yang dilakukan oleh pengunjung yang datang."

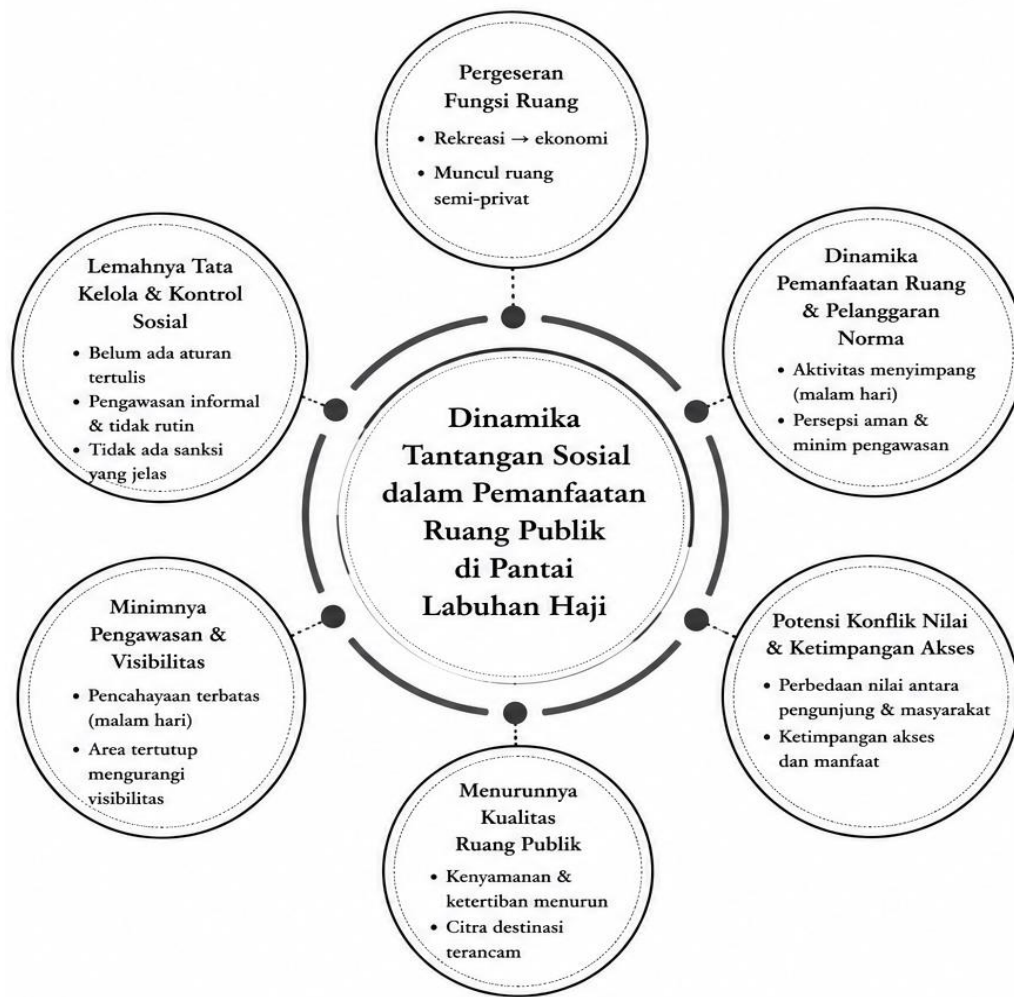
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik masih berorientasi pada penyediaan fasilitas ekonomi, sementara aspek pengawasan sosial

belum menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan destinasi. Pedagang mengaku enggan menegur pengunjung karena khawatir kehilangan pelanggan, sedangkan pemerintah desa belum memiliki regulasi khusus mengenai tata tertib pemanfaatan kawasan wisata.

Perspektif tata kelola destinasi (*destination governance*), keberhasilan pengelolaan ruang publik ditentukan melalui koordinasi antaraktor, kejelasan regulasi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi ruang publik (Bramwell & Lane, 2011; Hall, 2019). Tanpa adanya aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang konsisten, ruang publik cenderung mengalami konflik fungsi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Marisa (2011), Hayati (2022), dan Fitri (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial merupakan faktor utama munculnya berbagai bentuk penyimpangan di kawasan wisata. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa akar persoalan bukan semata-mata terletak pada perilaku pengunjung, melainkan pada belum terintegrasinya pengelolaan ruang publik dalam sistem tata kelola destinasi wisata. Dengan kata lain, tantangan sosial yang muncul merupakan konsekuensi dari belum optimalnya sinergi antara pengelola, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang publik.

Berkembangnya aktivitas ekonomi melalui warung kopi telah meningkatkan vitalitas kawasan wisata Pantai Labuhan Haji, tetapi pada saat yang sama menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan ruang publik. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan manfaat ekonomi, melainkan juga memerlukan tata kelola ruang publik yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan keberlanjutan kawasan. Keseimbangan tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan menjaga kualitas ruang publik sebagai ruang bersama.



Gambar 1. Dinamika Tantangan Sosial dalam Pemanfaatan Ruang Publik

3. Keseimbangan: Antara Peluang Ekonomi dan Tantangan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik di Pantai Labuhan Haji berada pada titik pertemuan antara kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan kebutuhan menjaga fungsi sosial kawasan wisata. Di satu sisi, berkembangnya warung kopi telah membuka peluang ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan usaha mikro, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata. Di sisi lain, penyediaan fasilitas yang semakin nyaman dan bersifat semi-privat turut memengaruhi pola pemanfaatan ruang publik sehingga memunculkan berbagai tantangan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan pengembangan destinasi wisata dapat diukur melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan pengelola menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi publik ruang wisata.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ruang publik di Pantai Labuhan Haji telah mengalami transformasi menjadi ruang multifungsi. Warung kopi tidak lagi menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ruang rekreasi, dan ruang yang dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai aktivitas

pribadi. Perubahan fungsi tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas wisata yang mendorong masyarakat mengoptimalkan ruang sebagai sumber penghidupan. Namun, transformasi tersebut juga memperlihatkan bahwa semakin intensif pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan ekonomi, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme pengaturan yang mampu menjaga fungsi sosial kawasan. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Carmona (2021) bahwa ruang publik yang berhasil bukan hanya ruang yang aktif secara ekonomi, melainkan ruang yang mampu mempertahankan keseimbangan antara aksesibilitas, aktivitas ekonomi, keamanan, dan kualitas interaksi sosial.

Dalam perspektif pembangunan pariwisata berkelanjutan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dan tantangan sosial bukan merupakan dua kondisi yang saling bertentangan, melainkan dua konsekuensi yang muncul secara bersamaan dari proses pengembangan destinasi wisata. Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha warung kopi memperkuat kesejahteraan rumah tangga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Akan tetapi, peningkatan aktivitas tersebut juga menghasilkan intensitas penggunaan ruang publik yang lebih tinggi sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih adaptif. Hall (2019) menegaskan bahwa keberlanjutan destinasi wisata sangat ditentukan oleh kemampuan tata kelola dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelembagaan melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.

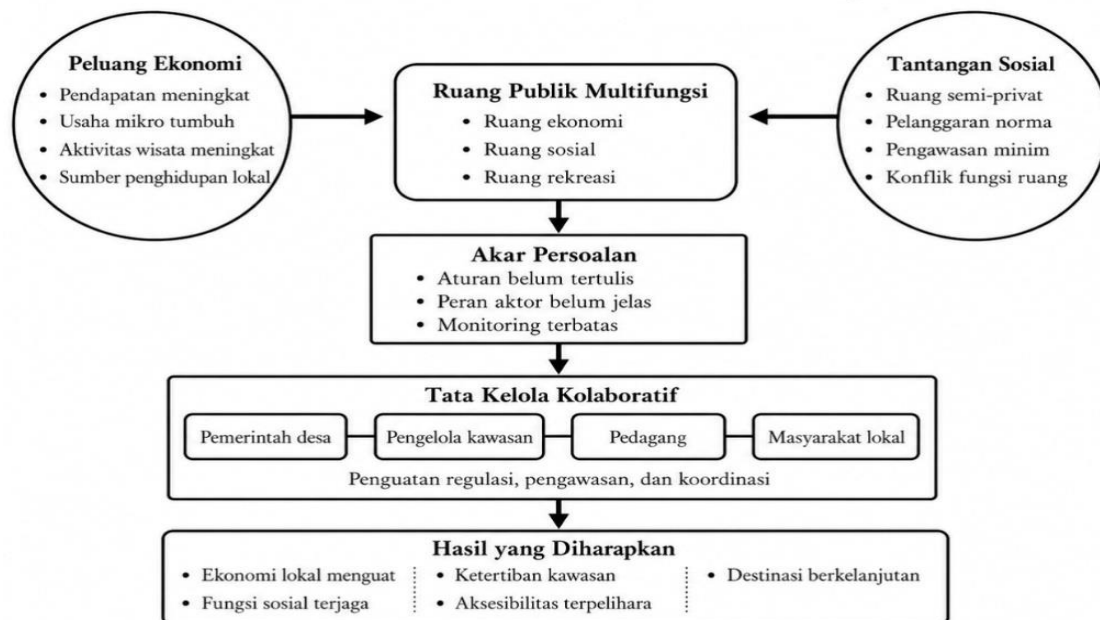
Hasil penelitian juga menunjukkan akar persoalan yang muncul bukan semata-mata terletak pada perilaku pengunjung, tetapi lebih jauh berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola ruang publik. Ketiadaan aturan tertulis mengenai pemanfaatan fasilitas, minimnya pengawasan, serta belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, pengelola kawasan, dan pelaku usaha menyebabkan ruang publik berkembang tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Dalam kondisi demikian, setiap aktor memanfaatkan ruang berdasarkan kepentingannya masing-masing sehingga fungsi sosial kawasan menjadi semakin sulit dikendalikan. Temuan ini memperkuat pandangan Dredge dan Jamal (2015) bahwa tata kelola destinasi wisata memerlukan koordinasi lintas aktor (*collaborative governance*) agar kepentingan ekonomi tidak berkembang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, keseimbangan antara peluang ekonomi dan tantangan sosial dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola ruang publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah desa memiliki peran dalam menyusun regulasi mengenai pemanfaatan kawasan wisata, termasuk pengaturan jam operasional, standar penyediaan fasilitas, serta tata tertib bagi pengunjung. Pengelola kawasan berperan dalam melakukan pengawasan, menyediakan papan informasi mengenai aturan kawasan, dan membangun sistem monitoring terhadap aktivitas pengunjung. Di sisi lain, pedagang warung kopi sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi perlu dilibatkan dalam menjaga fungsi sosial kawasan melalui penyediaan fasilitas yang tetap memperhatikan aspek keterbukaan ruang dan kenyamanan seluruh pengunjung. Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi unsur penting dalam membangun kontrol sosial yang bersifat preventif melalui

pengawasan berbasis komunitas. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi sekaligus penerima manfaat pembangunan pariwisata (Goodwin & Santilli, 2009; Giampiccoli & Mtapuri, 2020).

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian pengelolaan ruang publik di destinasi wisata. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak memfokuskan perhatian pada penyimpangan sosial atau manfaat ekonomi secara terpisah, penelitian ini menunjukkan kedua aspek tersebut merupakan bagian dari satu sistem pengelolaan ruang publik yang saling memengaruhi. Peluang ekonomi muncul melalui pemanfaatan ruang publik sebagai ruang usaha, sedangkan tantangan sosial berkembang ketika pemanfaatan tersebut tidak diikuti oleh mekanisme tata kelola yang memadai. Dengan demikian, keberlanjutan destinasi wisata tidak cukup dibangun melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola ruang publik yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi, keteraturan sosial, dan kualitas pengalaman wisata.

Berdasarkan sintesis hasil penelitian, dapat dirumuskan pengelolaan ruang publik di Pantai Labuhan Haji memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative public space governance*) yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi masyarakat, fungsi sosial ruang publik, dan peran kelembagaan pemerintah secara seimbang. Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai aktor yang berbagi tanggung jawab dalam mengelola ruang publik sehingga aktivitas ekonomi berkembang seiring dengan terpeliharanya ketertiban sosial dan fungsi publik kawasan wisata.



Gambar 2. Keseimbangan antara Peluang Ekonomi dan Tantangan Sosial dalam Pengelolaan Ruang Publik

Konteks ini, ruang publik berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat melalui berkembangnya usaha warung kopi, sekaligus menjadi ruang bersama yang menjamin keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan inklusivitas bagi seluruh pengguna kawasan wisata. Pengelola kawasan perlu menyeimbangkan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dengan penerapan regulasi, pengawasan, dan mekanisme kontrol sosial agar pemanfaatan ruang tetap selaras dengan fungsi sosial kawasan wisata.

Temuan penelitian menunjukkan keberhasilan pengelolaan destinasi wisata bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika pemanfaatan ruang publik. Peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan pendapatan masyarakat, penguatan fungsi sosial ruang publik, serta terjaganya ketertiban kawasan merupakan indikator yang saling berkaitan dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik perlu mengintegrasikan tujuan ekonomi, penguatan tata kelola, dan perlindungan nilai-nilai sosial sebagai fondasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan pengelolaan ruang publik di Pantai Labuhan Haji menghasilkan dinamika yang mempertemukan peluang ekonomi dan tantangan sosial dalam satu ruang yang sama. Berkembangnya 24 warung kopi di kawasan pesisir telah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan peluang usaha, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan berkembangnya usaha mikro berbasis pariwisata. Kondisi tersebut memperlihatkan ruang publik berkembang menjadi aset ekonomi yang mendukung penghidupan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan vitalitas kawasan wisata.

Di sisi lain, pemanfaatan ruang publik juga memunculkan tantangan sosial yang ditandai oleh pergeseran fungsi ruang menuju ruang semi-privat, munculnya aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial, serta lemahnya regulasi dan mekanisme pengawasan. Temuan ini menegaskan dinamika sosial di kawasan wisata dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik ruang, perilaku pengunjung, dan kualitas tata kelola destinasi. Oleh karena itu, tantangan sosial yang muncul tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perilaku individu, tetapi sebagai konsekuensi dari belum optimalnya pengelolaan ruang publik.

Berdasarkan sintesis kedua temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pengelolaan ruang publik di destinasi wisata memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi lokal dan pemeliharaan fungsi sosial kawasan. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyusunan regulasi, pengawasan, serta pengelolaan fasilitas wisata. Pendekatan ini mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keberlanjutan ruang publik sebagai ruang bersama.

Secara konseptual, penelitian ini memperluas kajian pengelolaan ruang publik di destinasi wisata dengan menunjukkan peluang ekonomi dan tantangan sosial

merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola ruang publik. Temuan ini menegaskan keberlanjutan destinasi wisata bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi, fungsi sosial ruang publik, dan penguatan kelembagaan ke dalam sistem pengelolaan destinasi yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan

Referensi

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, N. (2023). *Pergeseran Makna Ruang pada Kampung Wisata Pulo Geulis, Bogor*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
- Carmona, M. (2021). *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (3rd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dredge, D., & Jamal, T. (2015). Progress in tourism planning and policy: A post-structural perspective on knowledge production. *Tourism Management*, 51, 285–297.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism and sustainable development. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1–15.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11. International Centre for Responsible Tourism.
- Fitrianto, A. R., Halim, A., & McMichael, H. (2024). Empowering a local economy in Indonesia through tourism and good practice. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 24(1), 158–172. <https://doi.org/10.69598/hasss.24.1.261046>
- Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Haikal, A., Aryani, P., & Riyaldi, H. (2022). Analisis dampak pariwisata halal menunjang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(1).
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060.
- Hayati, P. (2022). *Penyimpangan Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pantai Lhoknga Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ramadhan, S. H. (2024). Tourism transformation in Canggü: Impacts on socio-cultural, economic, and environmental dimensions with sustainable

- development strategies. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 15(2), 98–105. <https://doi.org/10.31294/khi.v15i2.20781>
- Hisyam, C. J., & Hidayat, A. R. (2015). *Sosiologi: Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Kapita, H., & Kusman, M. R. (2022). Analisis pemanfaatan ruang terbuka publik di kawasan pesisir Pantai Army Dock Kabupaten Pulau Morotai. *DINTEK*, 15(2), 118–124.
- Karyatun, S., Wiweka, K., Demolingo, R. H., Adnyana, P. P., & Nurfikriyani, I. (2021). Tourist village multiplier effect studies: small scale approach: best practice of Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research*, 6(2), 139-153.
- Khasanah, K. (2018). *Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kontrol Sosial di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Marisa. (2011). Perilaku pergaulan bebas di kawasan wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. *Jurnal Komunitas*, 3(2), 146–154.
- Marpaung, T. K. R., & Sudrajat, A. (2024). Wajah baru Jalan Tunjungan Surabaya: Evolusi ruang publik menjadi destinasi wisata Generasi Z. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 13(2).
- Mehta, V. (2020). Public space: A key resource for cities and communities. *Journal of Urban Design*, 25(6), 803–804.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pajriah, P. N., Sulaksana, J., & Umyati, S. (2025). Dampak berganda (multiplier effect) objek wisata terhadap perekonomian masyarakat lokal. *Majalah Ilmiah UNIGA*, 8(1).
- Rahmani, S., Amaturrahmi, & Syam, H. M. (2022). *Aktivitas nongkrong di pantai sebagai gaya hidup: studi pada pengunjung SunsetSurf Cafe Lhoknga Aceh Besar*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(10), 158–165.
- Ristiawan, R., Huijbens, E. H., & Peters, K. (2024). Apprehending land value through tourism in Indonesia: Commodification of rural landscapes through geoparks. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 115(1), 170–186. <https://doi.org/10.1111/tesg.12597>
- Rosa, E., Lestari, S. Y., Juraida, I., & Chadijah, I. D. (2022). Perilaku menyimpang pada pengunjung wisata Pelabuhan Meulaboh Aceh Barat. *Jurnal SOCIETY*, 2(2).
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893–1907. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Suardi, S. (2016). *Perilaku Menyimpang Remaja*. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.
- Wijaya, I. B. P., & Mustika, M. D. S. (2025). The relationship between foreign tourists and average length of stay on local original income (PAD) in Bali Province with tourist expenditure as an intervening variable. *Journal of Regional Economics and Development*, 3(2), 14.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.